

SERATUS HARI KERJA WALI KOTA PALANGKA RAYA, DINSOS LAKUKAN REINTEGRASI KELUARGA TERHADAP LANSIA TERJARING



Palangka Raya, (21/04/2025) – Dalam upaya menciptakan ketertiban sosial yang sejalan dengan Program Seratus Hari Kerja Wali Kota Palangka Raya, Dinas Sosial kembali melaksanakan kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang beraktivitas di sejumlah titik strategis, termasuk di kawasan lampu merah atau perempatan jalan utama.

Dalam kegiatan ini terjaring seorang lansia yang selama ini berada di sekitar lampu merah dan rentan beraktivitas di jalanan. Setelah dilakukan pendekatan secara persuasif dalam identifikasi dan asesmen awal, diketahui bahwa lansia tersebut memiliki keluarga.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial melakukan proses reintegrasi sosial dengan mengembalikan klien ke keluarganya, yang berada di wilayah Kota Palangka Raya. Proses ini dilakukan dengan pendampingan dari Petugas Dinas Sosial dan bekerja sama dengan pihak Kelurahan Palangka agar berperan aktif memfasilitasi komunikasi dan penerimaan kembali klien di lingkungan keluarga.

“Reintegrasi keluarga adalah pendekatan yang kami kedepankan untuk penanganan gepeng, khususnya lansia. Kami berusaha agar mereka tidak hanya ditangani sesaat, tetapi dikembalikan ke sistem sosial yang lebih aman dan mendukung, yaitu keluarga,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, H. Riduan, S.KM., M.M.Kes.

Ia menegaskan bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis di jalan perlu diselesaikan secara menyeluruh, dengan pendekatan rehabilitatif. Dalam proses reintegrasi, Petugas Dinas Sosial juga memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya peran mereka dalam memberikan dukungan dan pengawasan kepada penerima manfaat mengingat ia sudah berusia lanjut dan sangat beresiko apabila melaksanakan aktivitas di jalanan.

Dinas Sosial Kota Palangka Raya berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas penanganan gepeng melalui berbagai pendekatan mulai dari penjangkauan di lapangan, layanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga kolaborasi lintas sektor dengan kelurahan, kepolisian, dan lembaga masyarakat lainnya. Masyarakat juga diimbau untuk tidak memberikan uang secara langsung kepada gepeng di jalan, karena hal tersebut justru dapat memperkuat keberadaan mereka di ruang publik dan menyulitkan proses rehabilitasi. –(AK)